



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA KUSUMA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **847762**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 2036 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 216.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU ROCKY Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. LAINNYA, MITSUBISHI LIGHT TRUCK Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
6. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
7. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 8.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	501.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.225.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.225.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.